

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Keimigrasian*. UU No. 6 Tahun 2011.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Perpres No. 44 Tahun 2015.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia*. Permenkumham No. 11 Tahun 2020.

### B. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Isbaniah, Fathiyah dkk. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Yasin, Muhammad, dkk. *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: UI-CSGAR, 2017.

### C. Lain-lain

- Adrian, Kevin. "Memahami Epidemiologi dan Istilah-istilahnya". <https://www.alodokter.com>. Diakses tanggal 25 Desember 2020.
- Atmadja, Dewa Gede. "Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen". *Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana* 10 April 1996.
- Dewansyah, Bilal. "Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya". *Hasanudin Law Review*, 1 (2).
- Fauziah, Asytari. "Update Virus Corona Nasional Minggu 6 September 2020: Tambah 3.128, 190.665 Kasus, NTB Posisi ke-14". <https://mataram.tribunnews.com>. Diakses tanggal 8 Maret 2021.
- Hadjon, Philipus M. "Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih". *Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 1994.
- Hidayat, Rofiq. "Pemerintah Diminta Perketat Prosedur WNA Masuk Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60a4eb2ca6b4c/pemerintah-diminta-perketat-prosedur-wna-masuk-indonesia/>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- Humas Kemkes RI. "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 19 Maret 2020". <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-maret-2020/#.Xz3JrPMzBIU>. Diakses tanggal 1 Juni 2021.
- Indarti, Shofia Trianing. "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1 April 2021.



- Kantaprawira, Rusadi. "Hukum dan Kekuasaan". *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Koesno, Dhita. "Update Corona Dunia 20 November 2020 dan Data WHO Terkini". <https://tirto.id>. Diakses tanggal 25 Desember 2020.
- Kusumawardani, Desinta Wahyu. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, November 2020.
- Maharani, Tsarina. "Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB". <https://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 8 Maret 2021.
- Muhlisa, A.N., dan Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 (2), 2020.
- Redaksi. "3 Arti Kata Pembatasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". <https://lektur.id>. Diakses tanggal 25 Desember 2020.
- Sande, J.P. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa". *Indonesian Perspective*, No. 5, 2020.
- Susilo, Adityo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
- Suswantoro, S. "Sifat Kewenangan". <http://repository.untag-sby.ac.id>. Diakses 1 Oktober 2020.
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Syahrin, M.A. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris". *Majalah Hukum Nasional*, 49 (1), 2020.
- Zulfikar, Muhammad. "Kemenkumham: WNA Masuk Indonesia Hanya Untuk Kepentingan Esensial". <https://www.antaraneews.com/berita/2145006/kemenkumham-wna-masuk-indonesia-hanya-untuk-kepentingan-esensial>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.